

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pengembangan Desa Wisata Bantaragung memperlihatkan bahwa keberlangsungan pengelolaan wisata desa tidak hanya ditentukan oleh potensi wisata yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan berbagai aktor dalam membangun dan menjaga praktik kolaborasi secara berkelanjutan. Keterlibatan Pemerintah desa, Pokdarwis, Masyarakat local menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang saling melengkapi dalam proses pengelolaan dan pengembangan kegiatan pariwisata desa. Interaksi antar aktor berkembang melalui komunikasi, koordinasi, serta pengalaman kerja sama yang berlangsung secara bertahap dalam konteks sosial masyarakat desa.

Dinamika kolaborasi yang terbentuk menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata berjalan melalui proses penyesuaian kepentingan antar aktor, bukan semata melalui mekanisme kebijakan yang bersifat *top-down*. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan wisata, baik melalui keterlibatan dalam pengelolaan program, pelaksanaan kegiatan, maupun kontribusi dalam menjaga lingkungan dan identitas lokal desa wisata. Hubungan antar aktor dibangun melalui dialog, koordinasi, dan pertukaran informasi yang memungkinkan terbentuknya pemahaman bersama mengenai arah pengembangan desa wisata.

Peran kepemimpinan lokal turut memperkuat keberlangsungan interaksi kolaboratif melalui upaya memfasilitasi komunikasi antar pihak serta mendorong

keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas pengembangan wisata. Kepemimpinan tersebut berfungsi sebagai penghubung yang membantu menjembatani perbedaan kepentingan sekaligus menjaga stabilitas hubungan kerja sama antar aktor. Praktik kolaborasi yang berlangsung tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinasi administratif, tetapi berkembang menjadi proses sosial yang membangun kepercayaan dan komitmen bersama.

Dinamika kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung dapat dipahami melalui kerangka model *Collaborative Governance*, dimana kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif saling berkaitan dalam membentuk praktik kolaborasi di tingkat desa. Model *Collaborative Governance* dalam penelitian ini berperan sebagai kerangka analisis untuk membaca temuan empiris mengenai interaksi antar aktor, sehingga mampu menjelaskan bagaimana kolaborasi terbentuk dan dipertahankan dalam pengembangan desa wisata.

Praktik kolaborasi yang berlangsung menunjukkan kontribusi terhadap keberlanjutan pengelolaan desa wisata yang ditandai oleh konsistensi keterlibatan aktor, keberlangsungan program kegiatan wisata, serta tumbuhnya rasa kepemilikan bersama terhadap desa wisata sebagai ruang ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang adaptif terhadap dinamika lokal.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung tidak hanya hadir sebagai konsep tata kelola, melainkan sebagai praktik kolaboratif yang terbentuk melalui interaksi sosial, kepercayaan, dan komitmen bersama antar aktor lokal. Pengembangan desa wisata pada akhirnya menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata desa bergantung pada kemampuan aktor-aktor yang terlibat dalam membangun kerja sama yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga pengembangan Desa Wisata Bantaragung dapat dipahami sebagai hasil dari proses *Collaborative Governance* yang berkembang secara kontekstual di tingkat desa.

#### **4.2 Saran**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung berkembang melalui interaksi antar aktor, keterlibatan masyarakat, serta peran kepemimpinan lokal dalam memfasilitasi proses kolaborasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, saran yang diajukan tidak dimaksudkan sebagai evaluasi kebijakan, melainkan sebagai upaya penguatan praktik kolaborasi yang telah berjalan agar dapat berkembang secara lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika pengembangan desa wisata.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung, beberapa saran diajukan sebagai upaya penguatan praktik kolaborasi yang telah berjalan agar dapat berkembang secara lebih berkelanjutan dan inklusif. Kolaborasi antar pemangku kepentingan pada dasarnya telah terbentuk melalui keterlibatan pemerintah desa, Pokdarwis,

masyarakat. Pengelolaan desa wisata ke depan diharapkan dapat terus memperluas ruang komunikasi dan dialog antar aktor, khususnya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga partisipasi masyarakat tidak hanya berada pada tahap pelaksanaan kegiatan tetapi juga dalam proses perumusan arah pengembangan desa wisata.

Penguatan kapasitas aktor lokal juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan guna menjaga keberlanjutan kolaborasi. Pemerintah desa bersama Pokdarwis dan BUMDes dapat mendorong penyelarasan peran antar aktor melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur tanpa menghilangkan fleksibilitas kerja sama yang selama ini telah terbentuk secara informal. Penyusunan pedoman kerja bersama atau kesepakatan operasional dapat dipertimbangkan sebagai acuan bersama dalam pengelolaan desa wisata, sehingga pembagian peran menjadi lebih jelas serta mampu mendukung konsistensi tata kelola kolaboratif dalam jangka panjang.

Keberlanjutan praktik kolaborasi juga perlu didukung melalui penguatan peran kepemimpinan lokal yang bersifat fasilitatif. Peran Pokdarwis sebagai penggerak utama diharapkan tetap membuka ruang keterlibatan bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemuda, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal, sehingga proses kolaborasi tidak bergantung pada individu tertentu tetapi berkembang sebagai tanggung jawab kolektif. Keterlibatan yang lebih luas diharapkan mampu memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap pengembangan desa wisata.

Selain itu, mekanisme dialog, musyawarah, dan evaluasi kegiatan yang telah berjalan dapat terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai ruang pembelajaran bersama antar aktor. Forum koordinasi yang ada diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai wadah teknis operasional, tetapi juga sebagai ruang pertukaran gagasan dan penyelarasan kepentingan dalam menghadapi dinamika pengembangan desa wisata. Upaya tersebut dapat mendukung terbentuknya hubungan kerja sama yang lebih adaptif serta menjaga keberlangsungan partisipasi antar pemangku kepentingan dalam jangka panjang.